RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT

RENSTRA 2013 - 2018
(REVIEW)

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2017

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

Rencana Strategis 2013 - 2018

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2018 merupakan bagian integral dari Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat.

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2018 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat untuk 5 (lima) tahun, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENCANA STRATEGIS periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMD 2013-2018 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Jawa Barat, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat lebih konkrit. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Rencana Strategis termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan.

Rencana Strategis yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan Rencana Strategis ini dapat dijadikan

skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja *(better performance).*

Semoga Rencana Strategis ini bermanfaat bagi kita semua!.

Bandung, 2017

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Jawa Barat

Prof. DR. H. YUDHA M. SAPUTRA, M.Ed

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19630312 198901 1002

DAFTAR ISI

	hal
BAB I PENDAHULUAN.....	**1**
1.1 Latar Belakang.....	**1**
1.2 Landasan Hukum.....	**4**
1.3 Maksud dan Tujuan.....	**7**
1.4 Fungsi dan Kedudukan Rencana Strategis Dispora.....	**8**
1.5 Sistematika Penulisan.....	**8**
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT.....	**11**
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat.....	**11**
2.2 Sumber Daya Dispora.....	**56**
2.3 Kinerja Pelayanan Dispora.....	**59**
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dispora.....	**67**
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	**80**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi	

Jawa Barat..... **80**

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih..... **83**

3.3 Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Rencana Strategis Kab/Kota dan Rencana Strategis Kementiran Pemuda dan Olahraga..... **90**

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... **92**

3.5 Penentuan Isu-isu strategis..... **96**

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN..... 101

4.1 Visi dan Misi Dispora..... **101**

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dispora..... **102**

4.3 Strategi dan Kebijakan Dispora..... **107**

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF..... 111

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD..... 124

BAB VII PENUTUP..... 128

LAMPIRAN..... 129

DAFTAR TABEL

		hal
Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	61
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat.....	66
Tabel 2.3	Komparasi Capaian Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Terhadap Sasaran RPJMD Provinsi Jabar Tahun 2009 – 2013..	68
Tabel 2.4	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.....	69
Tabel 2.5	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat	73
Tabel 2.6	Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jabar Tahun 2013.....	76
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	82
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil	88
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Berdasasarkan Sasaran Rencana Strategis Kementerian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	89

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat BerdasarkanSasaran Rencana Strategis OPD Kabupaten/Kota dan Kementrian Pemuda dan Olahraga..... **91**
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangananya..... **93**
Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Analisi KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya..... **94**
Tabel 3.7 Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis..... **98**
Tabel 3.8 Nilai Skala Kriteria..... **99**
Tabel 3.9 Rata-rata Skor Isu Strategis **100**
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat ... **104**
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... **108**
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendaaan Indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat..... **119**
Tabel 6.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..... **128**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan isu kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance* dan *clean government*), Pemerintah Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Daerah yang diemban oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 adalah: **Dengan Iman dan Taqwa Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia**. Iman dan takwa merupakan landasan dalam melakukan aktivitas guna pencapaian visi dan misi yang ditetapkan melalui pengamalan agama dan termaju dimaksudkan bahwa provinsi Jawa Barat di Indonesia memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Indikator visi Pembangunan Jawa Barat termaju meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu (1) aspek sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh keadaan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan produktif; (2) aspek ekonomi yang ditunjukkan oleh terwujudnya struktur ekonomi yang tangguh, tumbuh relatif tinggi, hasil-hasil pembangunan merata, serta mampu bersaing dalam tataran global; (3) aspek pemerintahan yang ditunjukkan oleh kondisi demokrasi yang berkualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tertib sosial, hukum yang tegak dan konsisten, peraturan daerah mendorong kinerja pemerintahan yang profesional, akuntabel dan transfaran sehingga tata kelola pemerintahan tertuju pada *good governance* dan *clean government*; (4) aspek sosial dan budaya ditunjukkan oleh keadaan politik yang stabil, derajat kehidupan sosial

masyarakat yang meningkat, keamanan dan ketertiban yang terjamin, pengamalan agama terlaksana konsisten, kerukunan hidup antar umat beragama mewujud dan terjaga, serta nilai-nilai luhur budaya daerah lestari dan teramalkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD telah pula menetapkan Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2013-2018. Visi pembangunan daerah 2013-2018 **Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua.** Visi pembangunan daerah tersebut mengandung tiga kata kunci, yaitu: Maju, Sejahtera dan Untuk Semua. **Maju** : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial, **Sejahtera** : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan dan **Untuk Semua** : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat

Dari rumusan visi tersebut dituangkan pula misi yang diemban pemerintah Jawa Barat 2013-2018, dimana salah satu misi yang sangat erat kaitannya dengan bidang tugas Dinas Olahraga dan Pemuda adalah Misi Kelima, yaitu: **Misi Kelima**, **Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal**. Sedangkan tujuan yang ingin diwujudkan pada tahun 2018 adalah

Meningkatkan Peran pemuda, Seni, Budaya dan Pariwisata Jawa Barat yang tangguh dan berdaya saing**.**

Atas dasar rumusan visi, misi dan harapan pembangunan pada tahun 2013-2018 tersebut di atas maka, Visi Pembangunan Olahraga dan Pemuda Jawa Barat tentu harus seiring dengan rumusan visi sebagaimana tertuang dalam RPJM Daerah Jawa Barat tersebut. Oleh karena itu, pembangunan olahraga dan pemuda di Jawa Barat terarah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar maju dan sejahtera. Masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, berdaya saing, dan berbudaya serta memiliki spirit juara dan siap berkompetisi dapat ditempuh dengan pendekatan pembangunan olahraga yang lebih berpihak kepada masyarakat luas sehingga ketahanan jangka panjang masyarakat dalam mengarungi kehidupan dapat mewujud. Secara spesifik, arah dan tujuan dalam pembangunan keolahragaan di Jawa Barat ini, tentu dengan memanfaatkan potensi olahraga sebagai instrumen pembangunan yang diharapkan dapat berpengaruh secara langsung terhadap perubahan mendasar kehidupan masyarakat secara luas sehingga lebih sejahtera dan berkualitas. Sedangkan di bidang kepemudaan, arah dan udagan pembangunannya tentu dengan memanfaatkan potensi pemuda sebagai kelompok masyarakat khusus yang merupakan pengisi masa depan kehidupan bangsa, oleh karena itu dirasa perlu pemerintah untuk kembali mengingatkan rasa nasionalisme dan identitas diri pemuda dalam hal kebangsaan termasuk kejawabaratan yang diharapkan pemuda memiliki idealisme tinggi, berakhlak mulia, dan hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok yang mampu memberikan solusi dalam mengatasi persoalan-persoalan kehidupan masyarakat sehari-hari yang jauh dari penyakit sosial, serta tampil sebagai kelompok masyarakat yang

memberikan inspirasi dalam membangun kepeloporan/kejuangan, kewirausahaan dan kepemimpinan.

Dalam Renstra Tahun 2013 – 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat menetapkan Visi " **Menjadi Penggerak Utama Kemandirian Pemuda dan Kejayaan Olahraga Jawa Barat Tahun 2018 (MANDIRI JAYARAGA)** "

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renstra Disorda Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo Undang-undang nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah nomor 46);
10. Peraturan Daerah Nomor 21 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah (SOPD) pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008;
11. Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
15. Peraturan Gubernur Jawa Baratnomor 63 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Barat;
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Nomor 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Darah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018 adalah menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2013 – 2018 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA-OPD dan penetapan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018 sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018 adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, menjaga eksistensi organisasi dan sebagai instrumen pertanggung jawaban kepada *stakeholder* mengenai penggunaan sumber daya dalam melaksanankan tugas pokok dan fungsi serta menjabarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018 agar menjadi lebih optimal untuk mencapai target-target indikator kinerja yang telah

ditetapkan khususnya mengenai penyelenggaraan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat.

1.4 FUNGSI DAN KEDUDUKAN RENSTRA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA JAWA BARAT TAHUN 2013 – 2018

Fungsi dan kedudukan renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Barat tahun 2013-2018 terhadap perancanaan pembangunan lainnya adalah :

1. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 merupakan penjabaran visi, misi dan program dari RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, dengan memperhatikan perubahan RPJP daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025.
2. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja atau (Renja) serta penganggaran tahun 2013-2018

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat untuk periode tahun 2013–2018 kami susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan tujuan
1.4. Fungsi dan Kedudukan Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda
1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI JAWA BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2.2. Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu – isu Strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dalam periode tahun 2013–2018.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Membahas mengenai :

4.1. Visi dan Misi Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA BIRO DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA PROVINSI JAWA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat :

(1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, meliputi layanan kepemudaan, sarana prasana dan kesejahteraan, peningkatan prestasi olahraga serta pembudayaan olahraga yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga, yang menjadi kewenangan Provinsi;
b. penyelenggaraan pengelolaan pemuda dan olahraga, yang menjadi kewenangan Provinsi;
c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan bidang kepemudaan dan olahraga, yang menjadi kewenangan Provinsi;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Kepala Dinas:

a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
c. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang kepemudaan dan olahraga, meliputi layanan kepemudaan, sarana

prasana dan kesejahteraan, peningkatan prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga serta kesekretariatan;

d. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan kepemudaan dan olahraga;

e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan kepemudaan dan olahraga;

f. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan pengelolaan kepemudaan dan olahraga;

g. menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang kepemudaan dan olahraga;

h. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;

i. menyelenggarakan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Dinas;

j. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik (PIP);

k. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP);

l. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;

m. menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, rekomendasi dan

pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kepemudaan dan olahraga;

n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

o. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kepemudaan dan olahraga sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

p. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;

q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;

r. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan

s. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkordinasikan dan membina UPTD.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1) Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional olahraga dan pemuda yang meliputi keolahragaan, kepemudaan, kemitraan dan sarana prasarana;

2) Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas olahraga dan pemuda dan sarana prasarana;

3) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;
4) Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.

c. Rincian tugas Kepala Dinas :
1) Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
2) Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
3) Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan olahraga dan pemuda di Daerah;
4) Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, keolahragaan, kepemudaan, kemitraan dan sarana prasarana;
5) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
6) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
7) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Dinas;
9) Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
10) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

11) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretaris

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Sekretariat:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
b. menyelenggarakan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan Dinas serta pengelolaan aset;

e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD;

f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;

g. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksaanaan Dinas dan UPTD**;**

h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;

i. menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Dinas;

t. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik (PIP);

u. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP);

j. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;

k. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kepemudaan dan olahraga yang diselenggarakan oleh Bidang;
l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
m. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai kesekretariatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
n. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
o. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan UPTD;
p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas; dan
q. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Sekretariat membawahkan:
a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

a. Subbagian Perencanaan dan Program

(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pelaporan, meliputi koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan;
b. pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan menyusun bahan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
c. melaksanakan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan Pelaporan Dinas;
e. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program Dinas serta UPTD;
f. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Penyelenggaraan Angaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Dinas;

g. melaksanakan penyusunan bahan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP);
h. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian;
i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kepemudaan dan olahraga yang diselenggarakan oleh Bidang;
j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan dan pelaporan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian;
m. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas serta UPTD;
n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
o. melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

b. Subbagian Keuangan

(1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
b. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Subbagian Keuangan dan Aset:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis keuangan dan aset;
c. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
d. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
e. melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
f. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Dinas serta UPTD;
h. melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
m. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;

n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kepemudaan dan olahraga;

o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keuangan dan aset sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian;

r. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas serta UPTD;

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan

t. melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

c. Subbagian Kepegawaian dan Umum

(1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan administrasi umum Dinas;

b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan umum;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis kepegawaian dan umum;
c. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD;
d. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
e. melaksanakan pelayanan informasi publik (PIP);
f. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah Dinas;
g. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan barang Daerah;
h. melaksanakan pembinaan pengelolaan barang daerah UPTD;
i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
k. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan regulasi

kepemudaan dan olahraga lingkup Dinas;

l. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;

m. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian dan Sekretariat;

n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kepemudaan dan olahraga;

o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepegawaian dan umum sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian;

r. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan

o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang **Layanan Kepemudaan**

(1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, aspek layanan kepemudaan meliputi kewirausahaan pemuda, dan kepeloporan pemuda serta tenaga dan organisasi pemuda.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang layanan kepemudaan;
b. penyelenggaraan layanan kepemudaan;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Bidang Layanan Kepemudaan:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Layanan Kepemudaan;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang layanan kepemudaan;
c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian teknis di bidang layanan kepemudaan;
d. menyelenggarakan pengkajian bahan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan kepemudaan;
e. menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan peningkatan Kreativitas dan Kewirausahaan pemuda;
f. menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan peningkatan kepeloporan pemuda;
g. menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan peningkatan tenaga dan organisasi pemuda;
h. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
i. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan

keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang layanan kepemudaan;

j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang layanan kepemudaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

l. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;

m. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;

n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan

o. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bidang Layanan Kepemudaan membawahkan:

a. Seksi Kewirausahaan Pemuda;

b. Seksi Kepeloporan Pemuda; dan

c. Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda.

a. Seksi Kewirausahaan Pemuda

(2) Seksi kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda, meliputi penelusuran dan pemetaan potensi kreativitas dan kewirausahaan pemuda, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan potensi kreativitas dan kewirausahaan pemuda, fasilitasi akses pemodalan dan dukungan IPTEK pengembangan kreativitas dan kewirausahaan pemuda, peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Kreativitas Pemuda mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kreativitas pemuda;
b. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kreativitas pemuda;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Rincian Tugas Seksi Kreativitas Pemuda:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kewirausahaan Pemuda;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kewirausahaan pemuda;
c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang kewirausahaan pemuda;
d. melaksanakan penelusuran dan pemetaan potensi kreativitas dan kewirausahaan pemuda;
e. melaksanakan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan potensi kreativitas dan kewirausahaan pemuda;
f. melaksanakan fasilitasi akses pemodalan dan dukungan IPTEK pengembangan kewirausahaan pemuda serta peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda;
g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup seksi;
h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan

keuangan dan hibah/bantuan sosial di Bidang Layanan Kepemudaan;

i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kreativitas dan kewirausahaan pemuda sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;

l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan

n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Seksi Kepeloporan Pemuda

(1) Seksi Kepeloporan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan peningkatan kepeloporan pemuda, meliputi peningkatan wawasan pemuda dalam wawasan kebangsaan, pencegahan bahaya destruktif, kaderisasi dan pendayagunaan kepemimpinan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda pada tanggap bencana dan kerawanan sosial, pengembangan kepeloporan pemuda desa dan daerah khusus.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Kepeloporan Pemuda mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kepeloporan pemuda;

b. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kepeloporan pemuda;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi; dan
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Seksi Kepeloporan Pemuda:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kepeloporan Pemuda;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kepeloporan pemuda;
c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang kepeloporan pemuda;
d. melaksanakan peningkatan wawasan pemuda dalam wawasan kebangsaan, pencegahan bahaya destruktif, kaderisasi dan pendayagunaan kepemimpinan pemuda;
e. melaksanakan pengembangan kepeloporan pemuda pada tanggap bencana dan kerawanan sosial;
f. melaksanakan pengembangan kepeloporan pemuda desa dan daerah khusus;
g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup seksi;
h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang layanan kepemudaan;
i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepeloporan pemuda sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda.

(1) Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan peningkatan tenaga dan organisasi pemuda, meliputi pengkajian tenaga dan sumber daya pemuda, pembinaan organisasi kepelajaran, pembinaan organisasi kemahasiswaan, pembinaan organisasi kepemudaan, pembinaan komunitas pemuda, fasilitasi pembinaan gerakan pramuka serta standarisasi dan akreditasi organisasi kepemudaan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga dan organisasi pemuda;
b. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan tenaga dan organisasi pemuda;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga dan organisasi pemuda;
c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang tenaga dan organisasi pemuda;
d. melaksanakan pengkajian tenaga dan sumber daya pemuda;
e. melaksanakan pembinaan organisasi kepelajaran, pembinaan organisasi kemahasiswaan, pembinaan organisasi kepemudaan, pembinaan komunitas pemuda;
f. melaksanakan fasilitasi pembinaan gerakan pramuka;
g. melaksanakan standarisasi dan akreditasi organisasi kepemudaan;
h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup seksi;
i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang layanan kepemudaan;
j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai tenaga dan organisasi pemuda sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;

l. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Seksi;
m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan

(1) Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, aspek sarana prasarana dan kesejahteraan meliputi sarana dan prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga, dan kesejahteraan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan kesejahteraan;
b. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana dan kesejahteraan;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan :
a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan kesejahteraan;

c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian teknis di bidang sarana prasarana dan kesejahteraan;
d. menyelenggarakan pengkajian bahan norma, standar, prosedur dan kriteria sarana prasarana dan kesejahteraan;
e. menyelenggarakan pengembangan dan peningkatan sarana prasarana dan kesejahteraan pemuda dan olahraga;
f. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang sarana prasarana dan kesejahteraan;
h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang sarana prasarana dan kesejahteraan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
j. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;
k. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
l. meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
m. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan membawahkan:
a. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
c. Seksi Kesejahteraan.

a. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana pemuda, meliputi standarisasi dan akreditasi, pengembangan, pengelolaan, fasilitasi pembangunan, pelaksanaan penataan sarana dan prasarana pemuda.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis sarana dan prasarana pemuda ;
b. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pemuda ;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda :

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pemuda;
c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang sarana dan prasarana pemuda;
d. melaksanakan standarisasi dan akreditasi sarana dan prasarana pemuda;
e. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pemuda;

f. melaksanakan fasilitasi pembangunan dan penataan sarana dan prasarana pemuda;
g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di sarana dan prasarana pemuda;
i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai sarana dan prasarana pemuda sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga, meliputi standarisasi dan akreditasi, pengembangan, pengelolaan, fasilitasi pembangunan, pelaksanaan penataan sarana dan prasarana olaharaga.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana olahraga;
b. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana olahraga;
c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang sarana dan prasarana olahraga;
d. melaksanakan kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
e. Melaksanakan standarisasi dan akreditasi sarana dan prasarana olahraga;
f. Melakasanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
g. melaksanakan fasilitasi pembangunan dan penataan sarana dan prasarana olaharaga;
h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;

i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di sarana dan prasarana olahraga;

j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai sarana dan prasarana olahraga sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;

l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;

m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;

n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan

o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Seksi Kesejahteraan.

(1) Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pemuda dan olahraga, meliputi pengembangan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan, fasilitasi pengembangan karir atlit dan pemuda berprestasi, pemberiaan penghargaan kepemudaan dan keolahragaan, pengembangan sistem jaminan kesejehteraan hari tua atlit dan pelatih berprestasi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan;
b. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Seksi Kesejahteraan:

a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi kesejahteraan;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan;
c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang kesejahteraan;
d. melaksanakan pengembangan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan;
e. melaksanakan fasilitasi pengembangan karir atlit dan pemuda berprestasi;
f. melaksanakan pemberian penghargaan kepemudaan dan keolahragaan serta pengembangan sistem jaminan kesejehteraan hari tua atlit dan pelatih berprestasi;
g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di kesejahteraan;
i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kesejahteraan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;

k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;

l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan

n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

(1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang olahraga, aspek peningkatan prestasi olahraga meliputi pembibitan olahraga prestasi, pengembangan olahraga prestasi, tenaga dan organisasi olahraga prestasi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan prestasi olahraga

b. penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang peningkatan prestasi olahraga;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
d. menyelenggarakan pengkajian bahan norma, standar, prosedur dan kriteria peningkatan prestasi olahraga;
e. menyelenggarakan kegiatan peningkatan prestasi olahraga;
f. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang;
g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang peningkatan prestasi olahraga;
h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang peningkatan prestasi olahraga sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
j. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;
k. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
l. meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
m. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahkan:

a. Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi;
b. Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi; dan
c. Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi

a. Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi;

(1) Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembibitan olahraga prestasi, meliputi pemanduan dan pengembangan bakat olahraga, penyelenggaraan *event* olahraga usia muda/junior, pengelolaan pemusatan pelatihan olahraga pelajar, fasilitasi pembinaan olahraga mahasiswa.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pembibitan olahraga prestasi;
b. pelaksanaan pembibitan olahraga prestasi;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pembibitan olahraga prestasi;
c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang pembibitan olahraga prestasi;

d. melaksanakan pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
e. melaksanakan penyelenggaraan event olahraga usia muda/junior;
f. melaksanakan pengelolaan pemusatan pelatihan olahraga pelajar serta fasilitasi pembinaan olahraga mahasiswa;
g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di pembibitan olahraga prestasi;
i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pembibitan olahraga prestasi sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

b. **Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi**

(1) Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan olahraga prestasi, meliputi pembinaan

prestasi olahraga tingkat nasional, fasilitasi pembinaan prestasi olahraga tingkat Provinsi, penerapan IPTEK olahraga, penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat senior dan pengelolaan sentra pembinaan olahraga tingkat Provinsi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan olahraga prestasi;
b. pelaksanaan pengembangan olahraga prestasi;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan olahraga prestasi;
c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan olahraga prestasi;
d. melaksanakan pembinaan prestasi olahraga tingkat nasional;
e. melaksanakan fasilitasi pembinaan prestasi olahraga tingkat Provinsi, penerapan IPTEK olahraga;
f. melaksanakan kompetisi olahraga tingkat senior;
g. melaksanakan pengelolaan sentra pembinaan olahraga tingkat Provinsi;

h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di pengembangan olahraga prestasi;
j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan olahraga prestasi sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi

(1) Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan tenaga dan organisasi olahraga prestasi, meliputi peningkatan jumlah dan mutu tenaga keolahragaan, pembinaan organisasi keolahragaan prestasi, promosi dan pemasaran olahraga prestasi serta peningkatan akreditasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan tenaga dan organisasi olahraga prestasi;
b. pelaksanaan pembinaan tenaga dan organisasi olahraga prestasi;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi :

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi ;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga dan organisasi olahraga prestasi ;
c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang tenaga dan organisasi olahraga prestasi ;
d. melaksanakan peningkatan jumlah dan mutu tenaga keolahragaan;
e. melaksanakan pembinaan organisasi keolahragaan prestasi;
f. melaksanakan promosi dan pemasaran olahraga prestasi;
g. melaksanakan peningkatan akreditasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan;
h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di tenaga dan organisasi olahraga prestasi;

j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai tenaga dan organisasi olahraga prestasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Bidang Pembudayaan Olahraga

(1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, aspek pembudayaan olahraga, meliputi olahraga tradisional dan layanan khusus, pengembangan olahraga rekreasi, ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
b. penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Bidang Pembudayaan Olahraga :

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang pembudayaan olahraga;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pembudayaan olahraga;
d. menyelenggarakan pengkajian bahan norma, standar, prosedur dan kriteria pembudayaan olahraga;
e. menyelenggarakan kegiatan pembudayaan olahraga;
f. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pembudayaan olahraga
h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pembudayaan olahraga sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
j. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;
k. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
l. meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
m. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bidang Pembudayaan Olahraga membawahkan:

a. Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus;
b. Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi; dan
c. Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi.

a. Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus

(1) Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan olahraga tradisional dan layanan khusus meliputi, pembinaan olahraga tradisional dan layanan khusus, pengembangan olahraga usia dini, lanjut usia, dan olahraga khusus, pengembangan olahraga kesehatan, serta *event* olahraga tradisional dan layanan khusus tingkat Provinsi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Olahraga Berkebutuhan Khusus mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang olahraga tradisional dan layanan khusus;
b. pelaksanaan pembinaan olahraga tradisional dan layanan khusus;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Seksi Olahraga Berkebutuhan Khusus:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang olahraga tradisional dan layanan khusus;

c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang olahraga tradisional dan layanan khusus;
d. melaksanakan pembinaan olahraga tradisional dan layanan khusus (*Paralympic,* pesantren, usia dini, lanjut usia dan buruh*);*
e. melaksanakan pengembangan olahraga kesehatan;
f. melaksanakan *event* olahraga tradisional dan layanan khusus tingkat Provinsi;
g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di olahraga tradisional dan layanan khusus;
i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai olahraga tradisional dan layanan khusus sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi

(1) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan olahraga rekreasi meliputi pembinaan, olahraga massal, sanggar olahraga dan pusat kebugaraan, pembinaan olahraga petualangan, tantangan dan wisata, fasilitasi pengembangan ruang publik olahraga serta penyelenggaraan festival/invitasi olahraga rekreasi tingkat Provinsi;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan olahraga rekreasi;
b. Pelaksanaan pengembangan olahraga rekreasi ;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi; dan
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi :

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi ;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan olahraga rekreasi ;
c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan olahraga rekreasi ;
d. melaksanakan pembinaan, olahraga massal, olahraga petualangan, tantangan dan wisata;

e. melaksanakan fasilitasi pembinaan sanggar olahraga dan pusat kebugaraan;
f. melaksanakan fasilitasi pengembangan ruang publik olahraga;
g. melaksanakan *event* olahraga rekreasi tingkat Provinsi;
h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di pengembangan olahraga rekreasi ;
j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan olahraga rekreasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ;
l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi

(1) Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan peningkatan ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi, meliputi peningkatan jumlah dan mutu tenaga

keolahragaan, pengembangan promosi dan pemasaran olahraga, pembinaan organisasi keolahragaan serta peningkatan akreditasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan berkebutuhan khusus dan keolahragaan rekreasi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi ;
b. pelaksanaan penegembangan dan peningkatan ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi ;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi :

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi ;
c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi ;
d. melaksanakan peningkatan jumlah dan mutu tenaga keolahragaan berkebutuhan khusus dan olahraga rekreasi;
e. melaksanakan pengembangan promosi dan pemasaran olahraga berkebutuhan khusus dan olahraga rekreasi;

f. melaksanakan pembinaan organisasi keolahragaan berkebutuhan khusus dan olahraga rekreasi;
g. melaksanakan peningkatan akreditasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan berkebutuhan khusus dan keolahragaan rekreasi;
h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi;
j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

(1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional, pada Dinas dibentuk UPTD.

(2) Pembentukan dan Susunan serta Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

8. **Kelompok** Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.

(6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.

(8) Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Dinas, melalui Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :

Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

Sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Pemuda dan Olahraga Sebanyak 17 orang, terdiri dari 57 orang golongan IV, 65 orang golongan III, 1 orang golongan II dan 0 orang golongan I.

Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga
Berdasarkan Golongan

No.	STATUS	JUMLAH
1	Golongan IV	17 Orang
2	Golongan III	57 Orang
3	Golongan II	65 Orang
4	Golongan I	1 Orang
	Jumlah	**140 orang**

Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

JENIS PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
S – 3	1 Orang
S – 2	20 Orang
S – 1	41 Orang
D – 3	8 Orang
SLTA	68 Orang
SLTP	2 Orang
Jumlah	**140 orang**

Tabel Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	111 Orang	30 Orang

Tabel Berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH
1.	20 – 30 Tahun	28 Orang
2.	>30- 40 Tahun	51 Orang
3.	>40 – 50 Tahun	37 Orang
4.	>50 Tahun	25 Orang

Sarana Prasarana :

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Memiliki Sarana Prasarana Operasional Sebagai berikut :

No	Jenis Aset	Volume	Jumlah
1	Tanah	-	-
2	Bangunan	1.395 M2	1 Unit
3	Peralatan Kantor:		
	KOMPUTER		37 Unit
	LAPTOP		10 Unit
	NOTE BOOK		2 Unit
	HARD DISK		5 Unit
	PRINTER		43 Unit
	SCANER		2 Unit
	INFOCUS/PROYEKTOR		2 Unit
	UPS		15 Unit
	MICROPHON TABLE		1 Unit
	SOUND SYSTEM		1 Unit
	MEJA KERJA		5 Unit
	MEJA RAPAT ESSELON II/III		5 Unit
	MEJA RAPAT BIASA		1 Unit
	KURSI RAPAT PEJABAT		145 Unit
	LEMARI BUKU		4 Unit
	KURSI CHETOS		450 Unit
	KURSI BIASA		89 Unit
	MEJA 1/2 BIRO		196 Unit
	SOFA		18 Unit
	JAM DINDING		10 Unit
	LEMARI ES		6 Unit
	AC		17 Unit
	TELEVISI		19 Unit
	CAMERA		3 Unit

No	Jenis Aset	Volume	Jumlah
	HANDYCAM		1 Unit
	DISPENSER		12 Unit
	MIMBAR		1 Unit
	ALAT PEMADAM		15 Unit
	MEJA SEKOLAH		35 Unit
	TEMPAT TIDUR KAYU		70 Unit
	TEMPAT TIDUR BESI		1 Unit
	LEMARI KAYU		70 Unit
	LEMARI BESI		33 Unit
	LEMARI KACA		1 Unit
	FILLING KABINET 2 LACI		10 Unit
	FILLING KABINET 3 LACI		4 Unit
	FILLING KABINET 4 LACI		70 Unit
	BRANKAS		4 Unit
	PENGHANCUR KERTAS		4 Unit
	MESIN TIK		20 Unit
	CALCULATOR		24 Unit
	WHITE BOAR		7 Unit
4	Kendaraan:		
	MOBIL		8 Unit
	MICRO BUS		3 Unit
	SEPEDA MOTOR		12 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

Kinerja pelayanan organisasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran

yang ingin dicapai dapat dilihat pada tingkat capaian kinerjanya. Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sebagaimana terdapat pada Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan sehingga mempunyai kemandirian dalam berbagai sendi kehidupan serta meningkatkan prestasi olahraga dan pemasyarakatan olahraga	-	-	Jumlah partisipasi pemuda dalam pembangunan	134	160	350	750	1000	104	120	78	120	120	77,61 %	75,00 %	22,29 %	16,00 %	12,00 %
		-	-	Jumlah Organisasi kepemudaan sebagai wadah bagi pemuda dalam mengorganisasikan dirinya		835	500	600	750	0	835	624	180	1144	-	100,0 0%	124,8 0%	30,00 %	152,5 3%
		-	-	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dan sistem maggang	104	120	150	200	200	0	160	226	460	220	-	133,3 3%	150,6 7%	230,0 0%	110,0 0%
				Jumlah fasilitasi kepemudaan melalui : - Pembinaan - Pelatihan - Penjaringan - Pemilihan - Perekrutan/Rekrutmen - Musyawarah /Dialog - Konferensi - Belanegara - Pertukaran Pemuda	3838	2072	2484	2980	3577	3410	1687	924	711	136	88,85 %	81,42 %	37,20 %	23,86 %	3,80 %

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		-	-	Jumlah peserta POR PEMPROV dan PORPEMDA, Haornas, Porpemprov, Porburuh, Olahraga Ekstrem dan Pengiriman kontingen Olahraga Tradisional ke Tingkat Nasional	11000	11000	12000	13000	14000	3000	6000	12000	12903,8	13000	27,27%	54,55%	100,00%	99,26%	92,86%
		-	-	Jumlah tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR)		78	156	156	156		78	78	78	78	-	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
		-	-	Jumlah Peserta kampanye 3 (tiga) Program (GURAK,JUMSIHAT dan BBM)		15000	20000	200000	400000		10000	200000	200000	400000	-	66,67%	1000,00%	100,00%	100,00%
		-	-	Jumlah medali yang diraih oleh olahraga pelajar Jawa Barat dalam eveny-event olahraga di timgkat nasional, regional dan internasional	19	20	21	22	23	24	27	22	25	29	126,32%	135,00%	104,76%	113,64%	126,09%
		-	-	Jumlah atlet pelajar di sekolah yang terbina		960	1000	1026	1100	4302	1532	359	780	-	-	159,58%	35,90%	76,02%	-
		-	-	Jumlah database kepemudaan dan Keolahragaan	250		250		250	200		250		250	80,00%	-	100,00%	-	100,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		-	-	Jumlah atlet hasil pembinaan olahraga pelajar di daerah (Kab/Kota) se-Jabar Babak kualifikasi 8 cabor yang akan dipertandingkan di POPNAS pembinaan olahraga prestasi		2400	2450	2450	2450										
		-	-	Jumlah prestasi olahraga dalam even Nasional		4	5	5	5										
		-	-	Jumlah peserta liga Tk. Prov. Jabar		1300	1300	1300	1300										
		-	-	Jumlah Pembina Penggerak olahraga rekreasi dan Tradisional		155	155	155	155	47	383	78	1065	150	-	247,10%	50,32%	687,10%	96,77%
				Jumlah Pelaskanaan : - Penataran Cabang Olahraga - Penataran tenaga penggerak/ pembina/insstruktur olahraga - Seminar PORDA sebagai Pondasi Pembaharuan olahraga prestasi - Penelitian format peningkatan mutu		70	78	85	90										

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
				tenaga keoalahragaan - Pengiriman pelatih ke penataran tingkat internasional - Pengiriman pengurus lembaga ke semi nar internasional - Pendidikan singka keolahragaan															
		-	-	Jumlah atlet yang berprestasi yang bisa menjadi suritauladan bagi olahragawan khususnyanya dan masyarakat umumnya, Tenaga keolahragaan yang memiliki kualitas wasit dan pelatih, Wartawan pelitut olahraga, bupati/walikota yang berhasil memajukan olahraga di daerah baik dalam sarana fisik maupun SDM.		43	44	55	60		40	54	50	0	-	93,02 %	122,7 3%	90,91 %	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
				- Jumlah perolehan medali di even nasional, regional dan internasional. - Emas - Perak - Perunggu		Disesuaikan dengan perolehan medali Asean Game as 2010	Disesuaikan dengan perolehan medali Asean Game as 2010	Disesuaikan dengan perolehan medali Asean Game as 2010	Disesuaikan dengan perolehan medali Asean Game as 2010										
		-	-	Jumlah Fasilitasi dan melakukan kemitraan dengan instansi/institusi terkait, lembaga sosial masyarakat yang menangani kepemudaan dan keolahragaan.		30	40	50	60		65	105	80	60	-	216,67%	262,50%	160,00%	100,00%
		-	-	Pembangunan Infrastruktur dan Bangunan Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu (SPOrT) Jabar Tahun Jamak (Perda Tahun Jamak)		20 paket	7 paket	7 paket	7 paket					7 paket	-	-	-	-	100,00%

Tabel 2.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke-					Rata–rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Pendapatan																	
Retribusi Daerah																	
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan																	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		-	598,246,350.00	648,376,350.00	-		-	598,246,350.00	730,450,592.00			-	100%	112.65%			
Belanja																	
1. BTL		10,176,484,119.00	14,039,610,778.00	13,109,911,825.00	12,496,419,412.00		8,968,212,928.00	12,194,727,530.00	12,095,259,457.00			88.13%	86.86%	92.26%		12,455,606,533.50	89.08%
Gaji dan Tunjangan		8,247,664,119.00	6,289,870,778.00	5,844,461,825.00	6,045,719,412.00		7,651,851,778.00	5,666,252,070.00	5,772,395,680.00			92.78%	90.09%	98.77%		6,606,929,033.50	93.88%
Tambahan Penghasilan		1,928,820,000.00	7,749,740,000.00	7,265,450,000.00	6,450,700,000.00		1,316,361,150.00	6,528,475,460.00	6,322,863,777.00			68.25%	84.24%	87.03%		5,848,677,500.00	79.84%
-																	
2. BL		51,985,724,500.00	99,694,575,980.00	167,518,264,700.00	187,345,599,300.00		39,334,232,142.00	44,396,510,166.00	90,665,539,481.00			75.66%	45.79%	54.12%		126,636,041,120.00	58.52%
Belanja Pegawai		9,582,586,000.00	12,621,959,000.00	49,355,420,000.00	7,389,774,000.00		8,982,567,500.00	10,940,077,805.00	49,029,800,500.00			93.74%	86.67%	99.34%		19,737,434,750.00	93.25%
Belanja Barang dan Jasa		33,772,178,500.00	38,339,661,930.00	23,948,908,400.00	20,230,743,783.00		29,254,515,927.00	33,456,432,361.00	18,894,451,631.00			86.62%	87.26%	78.89%		29,072,873,153.25	84.26%
Belanja Modal		8,630,960,000.00	48,732,955,050.00	94,213,936,300.00	159,725,081,517.00		1,097,148,715.00	1,257,205,650.00	22,741,287,350.00			12.71%	2.58%	24.14%		77,825,733,216.75	13.14%
3. Pembiayaan																	
-																	
-																	
-																	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Pada umumnya Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga di Jawa Barat mempunyai fokus sasaran yang sama dengan Renstra Kab/Kota dan Kementrian Pemuda dan Olahraga yaitu menyelenggarakan fasilitasi olahraga dan pemuda.

Adanya rencana struktur dan pola ruang yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa barat Tahun 2013-2018 berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, dampak dan resiko lingkungan hidup, ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim serta ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Dampak terhadap pembinaan olahraga dan pemuda adalah berkurangnya fasilitas olahraga dan pemuda berupa alih fungsi lapangan olahraga dan lapangan kegiatan kepemudaan menjadi pemukiman, industri, dan sebagainya. Kondisi tersebut berdampak terhadap bertambahnya beban Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mencari fasilitas pengganti, pembangunan gedung olahraga, pengadaan sarana, dan sebagainya. Lebih dari itu upaya meningkatkan prestasi melalui pemasukan dan kegiatan latihan menjadi lebih baik.

Tabel 2.3

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Terhadap Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2013

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran BKPP Jawa Barat	Sasaran Renstra Pemprov Jabar
1	Meningkatnya Prestasi Olahraga Jawa Barat	100%	100%
2	Meningkatkan Kemandirian Pemuda Jawa Barat	100%	100%

Tabel 2.4

Hasil Telaahan Struktur Ruang Provinsi Jawa Barat

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Penempatan Ruang Pada Periode 2013 – 2018	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda	Arahan Lokasi Pengembangan OPD
1	WP Bodebekpunjur a. PKN Jabodetabek b. TPPS Nambo c. Jalan Tol Cikapali d. IPLT Depok 2 WP Sukabumi a. PKN Sukabumi b. PKW Palabuhanratu c. Jalan Lingkar Sukabumi 3 WP Ciayumajakuning a. PKN Cirebon	a. PKN Jabodetabek b. TPPS Nambo c. Perkotaan Jabodetabekpunjur termasuk kepulauan seribu a. PKN Cirebon	WP Bodebekpunjur a. PKN Jabodetabek b. TPPS Nambo c. Jalan Tol Cikapali d. IPLT Depok WP Sukabumi a. PKN Sukabumi b. PKW Palabuhanratu c. Jalan Lingkar Sukabumi WP Ciayumajakuning a. PKN Cirebon	Dengan adanya perubahan/ pengembangan struktur ruang, maka beban kerja Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi lebih besar khususnya dengan adanya alih fungsi fasilitas olahraga dan pemuda berupa lapangan atau GOR yang berdampak pada perlunya mencari lapangan/ GOR pengganti yang memenuhi syarat teknik bagi pembinaan olahraga dan pemuda.	Lokasi Pengembangan pelayanan Dinas Olahraga dan Pemudadi semua Wilayah Pengembangan (6 WP) di wilayah Jawa Barat

	b. PKW Kadipaten c. PKW Indramayu d. BIJB e. Optimalisasi Pelabuhan Cirebon f. Instalasi Pengolahan Limbah Cirebon Raya g. Jalan Tol Cisundawu h. SPAM Pantura	b. PKW Kadipaten c. PKW Indramayu d. Persiapan BIJB	b. PKW Kadipaten c. PKW Indramayu d. BIJB e. Optimalisasi Pelabuhan Cirebon f. Instalasi Pengolahan Limbah Cirebon Raya g. Jalan Tol Cisundawu h. SPAM Pantura		
4	<u>WP Bandung Raya</u> a. PKN Bandung Raya b. Pembangunan Monorail Bandung Raya c. Reaktifasi Jalur Kereta Api d. Pembangunan Waduk Jati Gede e. SPAM Regional Bandung Raya f. Pengolahan Limbah g. TPPS Sarimukti	a. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung b. Kawasan Pendidikan Jatinangor c. Kawasan Pengamat Dirgantara Tanjungsari d. TPPS Sarimukti e. TPPS Legok Nangka f. Jalan Lingkar Nagreg	<u>WP Bandung Raya</u> a. PKN Bandung Raya b. Pembangunan Monorail Bandung Raya c. Reaktifasi Jalur Kereta Api d. Pembangunan Waduk Jati Gede e. SPAM Regional Bandung Raya f. Pengolahan Limbah g. TPPS Sarimukti		

	h. TPPS Regional Legok Nangka i. BIUTR (Tol Dalam Kota Bandung) j. Jalan Tol Seroja dan Cisundawu		h. TPPS Regional Legok Nangka i. BIUTR (Tol Dalam Kota Bandung) j. Jalan Tol Seroja dan Cisundawu		
5	k. Jalan Bandung-Pangalengan-Rancabuaya l. Jalan Lingkar Nagreg m. Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor <u>WP Priangan Timur – Pangandaran</u> a. Pusat Pertumbuhan : - Pangandaran - Rancabuaya b. PKW Pangandaran c. PKW Tasikmalaya d. Kawasan Strategis Pangandaran-	a. PKW Pangandaran b. PKW Tasikmalaya	k. Jalan Bandung-Pangalengan-Rancabuaya l. Jalan Lingkar Nagreg m. Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor <u>WP Priangan Timur – Pangandaran</u> a. Pusat Pertumbuhan : - Pangandaran - Rancabuaya b. PKW Pangandaran c. PKW Tasikmalaya d. Kawasan Strategis Pangandaran-Kalipucang-		

6	Kalipucang-Sagara Anakan-Nusakambangan e. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pamengpeuk f. Kawasan Uji Coba Rakit Pamengpeuk g. Pengembangan Bandara Nusawiru <u>WP Purwasuka</u> a. PKW Cikampek-Cikopo b. Metropolitan Bodebekpunjur c. Pelabuhan Cilamaya d. IPLT Subang e. SPAM Pantura	a. PKW Cikampek-Cikopo b. Metropolitan Bedebekpunjur	Sagara Anakan-Nusakambangan e. Pengembangan Bandara Nusawiru <u>WP Purwasuka</u> a. PKW Cikampek-Cikopo b. Metropolitan Bodebekpunjur c. Pelabuhan Cilamaya d. IPLT Subang e. SPAM Pantura		

Tabel 2.5

Hasil Telaahan Pola Ruang Provinsi Jawa Barat

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2013-2018	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Biro Pemerintahan Umum
1	WP Bodebekpunjur a. Industri b. Perdagangan/Jasa c. Pertanian d. Peternakan e. Perikanan f. Agrowisata g. Perkotaan h. Kawasan Lindung	a. Industri b. Perdagangan/Jasa c. Pertanian d. Peternakan e. Perikanan f. Pariwisata g. Perkotaan	1. Program peningkatan dan pembinaan peran serta pemuda 2. Program pembinaan, permasyarakatan, dan pengembangan olahraga	Dengan adanya perubahan/ pengembangan pola ruang, maka beban kerja Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi lebih besar khususnya dengan adanya alih fungsi fasilitas olahraga dan pemuda berupa lapangan atau GOR yang berdampak pada perlunya mencari lapangan/ GOR pengganti yang memenuhi syarat teknik bagi pembinaan olahraga dan pemuda	Lokasi Pengembangan pelayanan Biro Pemerintahan Umum adalah di semua Wilayah Pengembangan (6 WP) di wilayah Jawa Barat
2	WP Sukabumi a. Pemukiman b. Pertanian c. Perikanan	a. Pemukiman b. Pertanian c. Peternakan			

	d. Peternakan e. Wisata Kelautan f. Pendidikan	d. Perikanan e. Pariwisata f. Pendidikan			
3	<u>WP Ciayumajakuning</u> a. Kota Budaya b. Perkebunan c. Perdagangan d. Peternakan e. Industri Kerajinan f. Pertanian g. Kawasan Lindung h. Perkotaan	a. Kota Budaya b. Perkebunan c. Pertanian d. Peternakan e. Industri Rumah f. Perkotaan			
4	<u>WP Bandung Raya</u> a. Perkotaan b. Perdaganngan/Jasa c. Pendidikan d. Industri Kreatif e. Persampahan	a. Perkotaan b. Perdagangan/Jasa c. Pendidikan d. Industri e. Persampahan			
5					

6	<u>WP Priangan Timur – Pangandaran</u> a. Pertanian b. Peternakan c. Pendidikan d. Perdagangan/Jasa <u>WP Purwasuka</u> a. Pertanian b. Peternakan c. Pariwisata d. Pendidikan e. Kawasan Lindung	a. Pertanian b. Peternakan c. Pariwisata d. Industri e. Perdagangan/Jasa a. Pertanian b. Peternakan c. Pariwisata d. Perikanan			

Tabel 2.6

Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
1	Kapaitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Daya dukung dan daya tamping LH untuk pengembangan pembangunan masih memungkinkan	Diperlukan peningkatan fasilitasi olahraga dan pemuda dan pembangunan mengacu pada pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien, serta memperhatikan keseimbangan ekosistem , perubahan iklim	Program harus terdiri dari kegiatan-kegiatan yang memperhatikan KLHS (berwawasan lingkungan khususnya dalam pembangunan sarana olahraga dan kepemudaan

2	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Alih fungsi lahan mengubah keseimbangan ekosistem dan mengancam prestasi olahraga dan pemuda	dan sumber daya hayati. Untuk peningkatan fasilitasi olah raga dan pemuda diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana, anggaran, kebijakan dan sumber daya manusia.	
3	Kinerja Layanan/jasa ekosistem	Pelayanan ekosistem belum memenuhi harapan		

4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Diperlukan eksploitasi SDA secara lebih terencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan SDA		
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Perubahan iklim belum disikapi dengan serius khususnya dalam pembinaan		

		olahraga dan pemuda		
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Ketahanan sumber daya hayati masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan oxigen bagi masyarakat		

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa barat mempunyai tugas pokok dan fungsi utama perumusan kebijakan, teknis urusan keolahragaan, kepemudaan, kemitraan, sarana dan prasarana, menyelenggarakan urusan olahraga dan pemuda, pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas olahraga dan pemuda, pengkoordinasian dan pembinaan UPTD. Terdapat permasalahan yang dapat di identifikasikan berdasarkan Tupoksi sebagai berikut

1. Kuantitas dan kompetensi SDM belum memadai
2. Sarana dan prasarana operasional belum memenuhi kebutuhan
3. Anggaran operasional belum memadai
4. Penyelenggaraan koordinasi keolahragaan dan kepemudaan belum sinergis, olahraga belum mencapai prestasi dan kemandirian pemuda

Upaya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat yang sudah, sedang dan akan dilakukan adalah meningkatkan kinerja aparatur dan meningkatkan koordinasi dengan OPD Pemerintah Provinisi Jawa barat dan Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi dibidang pembinaan olahraga dan pemuda.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat

Aspek Kajian	Capaian kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Jabar
			Internal	Eksternal	
1. Perumusan kebijakan 2. Penyelenggaraan urusan olahraga dan pemuda 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas olahraga dan pemuda 4. Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD	Belum sepenuhnya memenuhi target prestasi olahraga dan memandirikan pemuda	RPJMD RPJMD	1. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM 2. Terbatasanya sarana dan prasarana pelayanan	1. Terbatasnya anggaran operasional 2. Masih lemahnya koordinasi dengan OPD dan Kab/Kota,	1. Belum sinkronnya kebijakan tentang pembinaan olahraga dan pemuda 2. Kesulitan dalam pemasalahan latihan olahraga dan pemuda karena berkurangnya sarana olahraga dan pemuda

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat yaitu "Menjadi Penggerak Utama Kemandirian Pemuda dan Kejayaan Olahraga Jawa Barat" Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

Maju :

1. Terciptanya masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan mandiri
2. Melahirkan SDM yang terdidik, terampil, inovatif dan berdaya saing tinggi melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan-penelitian
3. Perwujudan tata kelola pemerintahan (governance) sebagai provinsi modern yang bermutu dan akuntabel, handal, efektif serta efisien.
4. Tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan

namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal.

5. Berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial

Sejahtera :

1. Kemajuan seluruh elemen yang ada di masyarakat baik masyarakat, wilayah maupun pelaku usaha.
2. Berbasis pada ketahanan keluarga sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat .
3. Merupakan perpaduan antara kesejahteraan lahiriah/materil dengan kesejahteraan bathiniah/jiwa.
4. Memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya serta membangun kepercayaan diri kolektif.

Untuk Semua :

1. Hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Jawa Barat
2. Hasil pembangunan yang berkeadilan dan tersebar di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan sebagai satu kesatuan Jawa Barat
3. Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi

pembangunan serta berperan aktif dalam pergaulan dunia

4. Keterbukaan informasi pembangunan dan terwujudnya jejaring komunikasi bagi seluruh institusi dan masyarakat

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Misi Pertama, **Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing.** Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu manusia Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.

Misi Kedua, **Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan.** Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu ekonomi Jawa Barat yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya.

Misi Ketiga, **Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan Partisipasi Publik.** Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu

infrastruktur Jawa Barat yang siap mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi.

Misi Keempat, **Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dengan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan.** Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu lingkungan Jawa Barat yang menjamin keberlanjutan pembangunan.

Misi Kelima**, Meningkatkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal**. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu pemerintahan Jawa Barat yang dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan.

Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut dijabarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu OPD, yang mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan pelayanan keolahragaan dan pemuda berdasarkan asas otonomi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, mengemban amanah untuk mewujudkan semua misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan Program Kepala Daerah di Bidang Olahraga dan Pemuda yaitu program peningkatan dan pembinaan peran serta

pemuda dan program pembinaan, pemasyarakatan, dan pengembangan olahraga. Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta analis faktor internal dan eksternal di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, maka dalam rangka memberikan pelayanan keolahragaan dan pemuda di Jawa Barat, serta mengacu pada visi Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat menetapkan visi tahun 2013-2018 yaitu :

"**Menjadi Penggerak Utama Kemandirian Pemuda dan Kejayaan Olahraga Jawa Barat Tahun 2018**" **(MANDIRI JAYARAGA)"**

Selanjutnya dengan mengacu pada misi Jawa Barat yang berhubungan erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, khususnya berkenaan dengan misi kelima Jawa Barat, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat menetapkan misi sebagai berikut:

Misi 1	:	Mewujudkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga Jawa Barat.
Misi 2	:	Meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

No	Misi dan Program Gubernur Jawa Barat	Permasalahan Pada Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Jabar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal (misi kelima) - Program peningkatan dan pembinaan peran serta pemuda - Program pembinaan, permasyarakatan,dan pengembangan olahraga	1. Belum tercapainya kemandirian pemuda dan prestasi olahraga sebagaimana diharapkan	1. Masih lemahnya koordinasi dengan OPD kab/kota dalam pembinaan olahraga dan pemuda 2. Kurangnya kuantitas dan kompetensi, sarana prasarana dan anggaran operasional	1. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga Jawa barat 2. OPD Kab/Kota, dunia usaha dan masyarakat masih membutuhkan jasa Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memandirikan pemuda dan meningkatkan prestasi olahraga

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Bedasarkan Sasaran Renstra Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Jawa Barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan serta penanganan komunitas tertentu	Belum tercapainya kemandirian pemuda sebagaimana diharapkan	Masih lemahnya koordinasi dengan OPD lain dan Kab/Kota dalam upaya memandirikan pemuda dan prestasi olahraga	Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga Jawa barat
2	Meningkatnya peran mayarakat dalam pembangunan olahraga, seni, budaya dan pariwisata	Belum tercapainya prestasi dan pemasyarakatan olahraga sebagaimana mestinya	Kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana dan pemenuhan anggaran operasionalnya	OPD Kab/Kota, dunia usaha dan masyarakat masih membutuhkan jasa Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memandirikan pemuda dan meningkatkan prestasi olahraga

3.3. Telaah RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Renstra Kabupaten/Kota dan Kementrian Pemuda dan Olahraga

Pembinaan olahraga dan pemuda di Jawa Barat tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap OPD Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang mengacu pada rencana strategis Provinsi dan Pusat.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Sasaran Renstra Kabupaten/Kota dan Kementrian Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mandirinya pemuda Jawa Barat	- Belum tercapainya kemandirian pemuda sebagaimana diharapkan	- Masih lemahnya koordinasi dengan OPD lain dan Kab/Kota dalam upaya memandirikan pemuda dan prestasi olahraga	- Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga Jawa barat
2	Meningkatnya prestasi olahraga Jawa Barat	- Belum tercapainya prestasi dan pemasyarakatan olahraga sebagaimana mestinya	- Kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana dan pemenuhan anggaran operasionalnya	- OPD Kab/Kota, dunia usaha dan masyarakat masih membutuhkan jasa Dinas Pemuda dan Olahraga dalam peningkatan prestasi olahraga dan memandirikan pemuda

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaah terhadap tata ruang wilayah dan kajian liangkungan hidup strategis dapat di identifikasi faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD di tinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1. Belum sinkronnya kebijakan dan koordinasi dengan OPD dan kab/kota
2. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur
3. Belum terpenuhinya kebutuhan dana operasional untuk pelayanan keolahragaan dan pemuda
4. Terbatasnya sarana prasarana penunjang kegiatan

Faktor Pendorong :

1. Adanya dukungan pemerintah pusat dan Provinsi dalam meningkatkan kemandirian pemuda, prestasi, dan pemasyarakatan olahraga
2. OPD, Kab/kota dunia usaha, dan masyarakat masih membutuhkan jasa layanan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memandirikan pemuda dan meningkatkan prestasi olahraga

Tabel 3.5
Permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda	Permasalahan Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Adanya rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang di 6 wilayah pengembangan Jawa Barat berupa PKN, PKW, atau pusat-pusat pengembangan lainnya akan berpengaruh terhadap fasilitas olahraga dan pemuda serta ruang publik	Dengan adanya perubahan/ pengembangan struktur ruang, maka beban kerja Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi lebih besar khususnya dengan adanya alih fungsi fasilitas olahraga dan pemuda berupa lapangan atau GOR yang berdampak pada perlunya mencari lapangan/ GOR pengganti yang memenuhi syarat teknik bagi pembinaan olahraga dan pemuda	1. Belum sinkronnya kebijakan dan koordinasi dengan OPD dan Kab/Kota dalam pembinaan olahraga dan pemuda 2. Kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana dan anggaran	1. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga Jawa Barat 2. OPD, kab/kota dunia usaha dan masyarakat masih membutuhkan jasa layanan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memandirikan pemuda dan meningkatkan prestasi olahraga

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Analisis KLHS Renstra Faktor Penghambat Pendorong Keberhasilan Penangannannya

No	Hasil KLHS Terkait Tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Daya dukung dan daya tampung LH untuk pengembangan pembangunan masih memungkinkan	1.Belum tercapainya kemandirian pemuda sebagaimana diharapkan 2.Belum tercapainya prestasi dan pemasyarakatan olahraga	1. Masih lemahnya koordinasi dengan OPD lain dan Kab/Kota dalam upaya memandirikan pemuda dan prestasi olahraga 2. Kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM, sarana	1. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga Jawa Barat 2. OPD, kab/kota dunia usaha dan masyarakat masih membutuhkan
2	Alih fungsi lahan mengancam prestasi olahraga dan kemandirian pemuda			
3	Memerlukan pelayanan yang lebih baik			

4	Perlu eksploitasi SDA secara terencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan SDA	sebagaimana mestinya	prasarana dan pemenuhan anggaran operasionalnya	jasa layanan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memandirikan pemuda dan meningkatkan prestasi olahraga
5	Perubahan iklim akan mengancam kegiatan olahraga dan pemuda			
6	Sumber daya hayati masih cukup memadai untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan oxigen masyarakat			

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat mencakup aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, ketersediaan dan pelayanan infrastruktur, penanganan kemiskinan dan pengangguran, penanganan bencana alam, pengendalian lingkungan hidup, penanganan ketenagakerjaan, pemerintahan dan politik, pengendalian kependudukan, pemberdayaan ekonomi, apresiasi budaya daerah dan pemerintahan otonom.

Memperhatikan isu-isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terkait dengan dinamika perkembangan masalah pembinaan pemuda dan olahraga di Provinsi Jawa Barat baik kualitas maupun kuantitasnya, maka terdapat beberapa isu strategis yaitu :

1. Koordinasi pembinaan pemuda dan olahraga dengan OPD dan Kab/Kota belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur
3. Terbatasnya sarana prasarana dan anggaran operasional
4. Berkurangnya fasilitas (lapangan/GOR) akibat alih fungsi lahan mengancam prestasi olahraga dan kemandirian pemuda

Langkah-langkah yang ditetapkan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dengan OPD dan Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan jumlah dan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan monev Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
3. Mengoptimalkan sarana prasarana dan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN untuk meningkatkan pelaporan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
4. Meningkatkan fasilitasi pertukaran sarana olahraga dan Kepemudaan dengan pihak ketiga

Tabel 3.7
Skor Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap public	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	**100**

Tabel 3.8
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Koordinasi pembinaan olahraga dan pemuda dengan OPD dan Kab/Kota belum optimal	20	10	20	10	15	25	100
2	Terbatasnya jumlah dan kompetensi aparatur	20	10	20	10	15	25	100
3	Terbatasinya sarana dan prasarana dan anggaran operasional	20	10	20	10	15	25	100
4	Berkurangnya fasilitas (lapangan/GOR) akibat alih fungsi lahan mengancam prestasi olahraga dan kemandirian pemuda	20	10	20	10	15	25	100

Tabel 3.9
Rata-Rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata skor
1	Koordinasi pembinaan olahraga dan pemuda dengan OPD dan Kab/Kota belum optimal	100	20
2	Terbatasnya jumlah dan kompetensi aparatur	100	20
3	Terbatasinya sarana dan prasarana dan anggaran operasional	100	20
4	Berkurangnya fasilitas (lapangan/GOR) akibat alih fungsi lahan mengancam prestasi olahraga dan kemandirian pemuda	100	20

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka peningkatan kualitas Pembangunan di Jawa Barat sesuai tema Pembangunan Jawa Barat yaitu" Pembangunan Jawa Barat yang lebih fokus, efektif dan sinergitas Berderajat Tinggi, Berbasis multi pihak dan mitra strategis Global untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat yag lebih maju dan Sejahtera" serta memperhatikan 10 (sepuluh) Common Goal prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat menetapkan visi :

"***Menjadi Penggerak Utama Kemandirian Pemuda dan Kejayaan Olah Raga Jawa Barat***"

Mengacu kepada Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dimaksud, maka Misi yang akan dilaksanakan tahun 2013 – 2018 adalah :

1. Mewujudkan kemandirian dan prestasi olahraga Jawa Barat
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

4.2.1 Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pelayanan tata kelola pemerintahan dan pembangunan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan sehingga mempunyai kemandirian dalam berbagai sendi kehidupan
2. Meningkatkan prestasi olahraga dan pemasyarakatan olahraga
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM, daya dukung sarana prasarana operasional dan pendanaan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

4.2.2 Sasaran

Sasaran dari penyelenggaraan pelayanan tata kelola pemerintahan dan pembangunan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Meningkatnya peran pembinaan organisasi kepemudaan
2. Meningkatnya pengembangan kewirausahaan untuk kelompok/organisasi kepemudaan
3. Meningkatnya prestasi pemuda di tingkat nasional
4. Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan.
5. Meningkatnya minat masyarakat dalam berolahraga
6. Meningkatnya pembinaan olahraga berkebutuhan khusus
7. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk olahraga masyarakat, pendidikan dan ruang publik bermutu
8. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk sentra pembinaan olahraga pelajar
9. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Tabel 4.1
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013 – 2018

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2014	2015	2016	2017	2018
-1	-2		-3	-4	-6	-7	-8	-9	-10
1.	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan sehingga mempunyai kemandirian dalam berbagai sendi kehidupan	1. Pemuda Jawa Barat yang berprestasi di tingkat nasional dan Internasional			3	3	4	4	5
			Meningkatnya peran pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	80	90	100	110	110
			Meningkatnya pengembangan kewirausahaan untuk kelompok/organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda Jawa Barat yang berwirausaha	80 Kelompok (800 orang)	100 Kelompok (1000 orang)	120 Kelompok (1200 orang)	140 Kelompok (1400 orang)	160 Kelompok (1600 orang)
			Meningkatnya prestasi pemuda di tingkat nasional	Jumlah pemuda Jawa Barat yang dibina untuk Tingkat Nasional	746	796	796	916	916
2.	Meningkatkan prestasi olahraga dan pemasyarakatan olahraga	1. Pringkat Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional pada :							
		Pekan Olahraga Nasional					1		
		Pekan Olahraga Pelajar Nasional				2		2	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2014	2015	2016	2017	2018
		Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Nasional			2		2		2
		2. Persentasi Partisipasi Masyarakat Jawa Barat Berolahraga			35,80%	36,00%	36,20%	36,60%	36,80%
			Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan.	Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional berdasarkan perolehan medali		28		30	
			Meningkatnya minat masyarakat dalam berolahraga	Persentasi partisipasi Masyarakat Jawa Barat dalam Berolahraga	35,80%	36,00%	36,20%	36,60%	36,80%
			Meningkatnya pembinaan olahraga berkebutuhan khusus	Jumlah event penyelenggaraan kejuaraan olahraga berkebutuhan khusus event regional nasional dan internasional.	-	2	3	4	5
			Meningkatnya sarana dan prasarana untuk olahraga masyarakat, pendidikan dan ruang publik bermutu	Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga pendidikan dan ruang publik bermutu	4 57	5 43	5	5	4

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2014	2015	2016	2017	2018
			Meningkatnya sarana dan prasarana untuk sentra pembinaan olahraga pelajar	Jumlah sarana yang terbangun pada kawasan SPOrT Jabar Arcamanik	5	3	3	11	11
3.	Meningkatkan Kompetensi SDM, daya dukung sarana prasarana operasional dan dana untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.	Jumlah aparatur yang lulus uji kompetensi dalam peningkatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat			4	5	6	7	8
			Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai 55	Nilai 60	Nilai 65	Nilai 70	Nilai 75
				Presentasi Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
				Jumlah SDM aparatur yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya	50%	55%	60%	65%	70%
				Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik	100%	100%	100%	100%	100%

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

4.3.1 Strategi

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dengan OPD dan Kab/Kota
2. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana, serta anggaran untuk meningkatkan pelayanan olahraga dan pemuda
3. Meningkatkan pemulihan fasilitas olahraga dan pemuda pengganti yang alih fungsi ke fasilitas lain

4.3.2. Kebijakan

Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 dalam melaksanakan pemerintahan umum

1. Memberikan fasilitas bagi peningkatan kemandirian pemuda pemasyarakatan olahraga dan prestasi olahraga
2. Memberikan fasilitas bagi peningkatan professionalme SDM, kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta pendanaan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

Tabel 4.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : "***Menjadi Penggerak Utama Kemandirian Pemuda dan Kejayaan Olahraga Jawa Barat Tahun 2018***"			
MISI 1 : Mewujudkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga Jawa Barat			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
1. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan sehingga mempunyai kemandirian dalam berbagai sendi kehidupan	Meningkatnya peran pembinaan organisasi kepemudaan	1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dengan OPD dan Kab/Kota 2. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana, serta anggaran untuk meningkatkan pelayanan olahraga dan pemuda 3. Meningkatkan pemulihan fasilitas olahraga dan pemuda pengganti yang alih fungsi ke fasilitas lain	1. Memberikan fasilitas bagi peningkatan kemandirian pemuda 2.Memberikanfasilitas bagi peningkatan profesionalisme SDM, kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta pendanaan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya pengembangan kewirausahaan untuk kelompok/organisasi kepemudaan		
	Meningkatnya prestasi pemuda di tingkat nasional		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
2. Meningkatkan prestasi olahraga dan pemasyarakatan olahraga	Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan.	1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dengan OPD dan Kab/Kota 2. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana, serta anggaran untuk meningkatkan pelayanan olahraga dan pemuda 3. Meningkatkan pemulihan fasilitas olahraga dan pemuda pengganti yang alih fungsi ke fasilitas lain	1. Memberikan fasilitas bagi peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olahraga 2.Memberikanfasilitas bagi peningkatan profesionalisme SDM, kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta pendanaan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya minat masyarakat dalam berolahraga		
	Meningkatnya pembinaan olahraga berkebutuhan khusus		
	Meningkatnya sarana dan prasarana untuk olahraga masyarakat, pendidikan dan ruang publik bermutu		
	Meningkatnya sarana dan prasarana untuk sentra pembinaan olahraga pelajar		

VISI : "***Menjadi Penggerak Utama Kemandirian Pemuda dan Kejayaan Olahraga Jawa Barat Tahun 2018***"			
MISI 2 : Meningkatkan kapasitas sumber daya pelayanan organisasi			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM, daya dukung sarana prasarana operasional dan dana untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana dan anggaran	1. Memberikan Kesempatan Kepada Aparatur Untuk Meningkatkan Profesionalismenya 2. Memberikan Fasilitas Bagi Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik serta Pendanaan 3. Memberikan Fasilitas Bagi Pelayanan Prima

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018

Perencanaan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan peran masyarakat (individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung jawab).

Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan fasilitas olahraga dan pemuda merupakan perpaduan perencanaan yang :

1) Partisipatif;
2) Dari atas (*top-down*)
3) Dari bawah (*bottom-up*)

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) terhadap pemerintahan dan pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana dan penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi; sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistik sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, komitmen dan integritas perencanaan disemua lapisan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; pada OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :

1. Menyusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah, mengacu pada RPJMD 2013-2018;
2. Menindaklanjuti Renstra dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD);

3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan kebutuhan/Kondisi aktual di bidang pemerintahan dan pembangunan;
4. Merumuskan Jabaran Rencana Program/Kegiatan Tahunan secara lebih "Holistik Integratif" : sesuai kebutuhan, kemampuan di dalam konteks Pembangunan Daerah dan bidang lain, tidak Eksklusif dan Konservatif;
5. Mencermati proporsi-proporsi antar ruang-ruang mata anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal mengacu pada rambu-rambu pekerjaan sosial. Hal ini sangat perlu disadari, agar karakteristik program-program pemerintahan umum di Jawa Barat jelas dan terjaga;
6. Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan lintas sektor dalam proses perencanaan, untuk mempertegas Eksistensi, memperkaya muatan dan menyerap aspirasi; perhatian untuk jajaran Legislatif;
7. Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan provinsi, kabupaten/kota- masyarakat optimal, demikian pula dengan sosialisasi secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga antara fungsi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengawasan benar-benar mengalir, antara lain menghasilkan "Roling – Plan".

8. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukan sumber APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan), sehingga perpaduan APBD-APBN dapat diarahkan untuk :
   a. Meningkatkan Jangkauan Sasaran Organisasi; dan
   b. Meningkatkan koordinasi pembinaan keolahragaan dan pemuda di provinsi Jawa Barat

5.2. PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018

Untuk mendukung upaya koordinasi pemerintahan dan pembangunan maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran yang cukup selain menyusun rencana upaya peningkatan pemerintahan dan pembangunan melalui:

1. Program peningkatan dan pembinaan peran serta pemuda dengan indikasi kegiatan kegiatan :
   1 Pembinaan Mental Spiritual Generasi Muda
   2 Kabizza Fest
   3 Peningkatan Potensi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda
   4 Fasilitasi Program Peran Serta Kepemudaan

5 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

2. Program pembinaan, pemasyarakatan, dan pengembangan olahraga dengan indikasi kegiatan :
   1 Peningkatan Potensi Atlet Melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jawa Barat
   2 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Tingkat Jawa Barat
   3 Fasilitasi Berbagai Kegiatan Olahraga di Masyarakat
   4 Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga
   5 Pengadaan Tanah dan Perencanaan Relokasi Pacuan Kuda
   6 Pembangunan Lanjutan Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu (SPOrT) Jabar Arcamanik
   7 Sosialisasi Jawa Barat sebagai Tuan Rumah PON XIX 2016
   8 Fasilitasi Pengembangan Tenaga Keolahragaan
   9 Pelaksanaan POSPEDA (Pekan Olahraga dan Seni Pesantren Daerah) Tk. Jawa Barat
   10 Pengerahan SP3OR
   11 Penyelenggaraan POPDA Jawa Barat Tahun 2014 dan Peninjauan Kegiatan POPWILNAS

Tahun 2014

12 Persiapan dan Pembangunan Infrastruktur Venue PON XIX Tahun 2016

13 Pengembangan Mitra Olahaga dengan berbagai Organisasi

14 Pemantapan 5 Program Kampanye Olahraga

15 Monitoring Tenaga Keolahragaan Event Nasional dan Internasional

16 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Tenaga Keolahragaan

17 Fasilitasi Pembinaan Olahraga Prestasi

18 Jawa Barat sebagai Tuan Rumah POPNAS XIII 2015

19 Monitoring Pembangunan Gelangang Olahraga di Kabupaten/Kota

5.3. INDIKATOR KINERJA RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018

Berikut adalah indikator kinerja Program yang dilaksanakan pada Dinas Pemuda dan Olahraga berdsarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

1. Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda

Indikator kinerja yang ditetapkan adalah :

a. Ketersediaan Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kepemudaan

b. Meningkatnya kematangan karakter dan mental pemuda menuju jawa barat juara

2. **Program Pembinaan. Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga.**

Indikator kinerja yang ditetapkan adalah :

a. Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu

b. Jumlah olahragawan berprestasi

c. Jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga

d. Jumlah partisipasi organisasi dalam berolahraga

5.4. KELOMPOK SASARAN

Dalam pelaksanaan pembangunan olahraga dan pemuda pada dasarnya mempunyai 2 (dua) kelompok sasaran yaitu :

a. Masyarakat Luas :

Bekaitan dengan penyelenggaraan pelayanan keolahragaan dan pemuda kelompok sasaran adalah masyarakat luas di Provinsi Jawa Barat

b. Kabupaten/Kota :

Kelompok sasaran pelayanan kepemudaan dan pemuda lainnya adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat

5.5. PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan keolahragaan dan pemuda, khususnya dalam hal pendanaan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan sehingga mempunyai kemandirian dalam berbagai sendi kehidupan	Meningkatnya peran pembinaan organisasi kepemudaan	Peningkatan Prosentase organisasi kepemudaan yang dibina				60 Organisasi	80		90		100		110		110		110			
				Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda	Ketersediaan Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kepemudaan	60 Organisasi	80	4.400	90	4.400	100	4.000	110	4.000	110	4.000	110	20.800	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
					Meningkatnya kematangan karakter dan mental pemuda menuju jawa barat juara	Orang	746	1.815	769	4.290	796	4.000	916	4.400	916	4.400	4.143	18.905		
				Pembinaan Mental Spiritual Generasi Muda	Jumlah peserta pelatihan pembinaan Mental Spiritual Generasi Muda Jawa Barat	120 Orang	250	500	275	550	300	650	350	750	400	1.000	1.575	3.450	Bidang Layanan Pemuda	Provinsi Jawa Barat
					Jumlah peserta pelatiha pembinaan Ideologi bagi Generasi Muda Jawa Barat	Orang	250	500	275	550	300	650	350	750	400	1.000	1.575	3.450		
				Kabizza Fest	Jumlah peserta peringatan hari sumpah pemuda di Jawa Barat	Orang	1.000	986	1.000	1.184	1.000	1.420	1.000	1.704	1.000	2.045	5.000	7.339	Bidang Layanan Pemuda	Provinsi Jawa Barat
					Jumlah lokasi pelaksanaan Kabizza Fest	Kab/Kota	27 Kab/kota		27 Kab/kota		27 Kab/kota		27 Kab/kota		27 Kab/kota		27 Kab/kota			
				Peningkatan Potensi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda	Jumlah fasilitasi untuk organisasi kepemudaan	Organisasi	80	2.850	90	2.900	100	3.000	110	3.100	110	3.100	490	14.950	Bidang Layanan Pemuda	Provinsi Jawa Barat
					Jumlah peserta pelatihan peningkatan kemampuan manajemen organisasi kepemudaan	Orang	200	500	300	750	400	1.500	500	1.250	600	1.500	2.000	5.500		Provinsi Jawa Barat
					Jumlah peserta peningkatan kualitas program lembaga kepemudaan	Orang	200	500	300	750	400	1.500	500	1.250	600	1.500	2.000	5.500		Provinsi Jawa Barat
					Jumlah peserta peningkatan kualitas sistem informasi manajemen program kepemudaan	Orang	100	500	200	750	300	1.500	400	1.250	500	1.500	1.500	5.500		Provinsi Jawa Barat
				Fasilitasi Kepemudaan di Jawa Barat melalui Pembinaan Unit Marching Band	Jumlah pembinaan Marching band gita pakuan	Orang	-	-	-	-	150		150		150		150		Bidang Layanan Pemuda	Provinsi Jawa Barat
	Meningkatnya pengembangan kewirausahaan untuk kelompok/organisasi kepemudaan	Peningkatan Jumlah pemuda Jawa Barat yang berwirausaha				20 Kelompok (200 Orang)	80 Kelompok (800 orang)	4.000	100 Kelompok (1000 orang)	5.000	120 Kelompok (1200 orang)	6.000	140 Kelompok (1400 orang)	7.000	160 Kelompok (1600 orang)	8.000	600 Kelompok (6000 orang)	30.000		
				Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah peserta kegiatan peningkatan kemampuan kewirausahaan pemuda		400		500		600		700		800		3.000		Bidang Layanan Pemuda	Provinsi Jawa Barat
					Jumlah peserta kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui sistem magang		400		500		600		700		800		3.000			
	Meningkatnya prestasi pemuda di tingkat nasional	Peningkatan prestasi pemuda Jawa Barat Tingkat Nasional				Orang	746		796		796		916		916		3.254			
				Fasilitasi Program Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pasukan paskibraka Jawa Barat		56		56		56		56		56				Bidang Layanan Pemuda	Provinsi Jawa Barat
					Jumlah seleksi PPAN, JPI?BPAP, KPN		35		35		35		35		35					
					Jumlah peserta SP-3 Provinsi Jawa Barat		75		75		75		75		75					
					Jumlah peserta perlombaan baris-berbaris tingkat Jawa barat		27		27		216		336		336					
					Jumlah pelatihan kepemimpinan untuk pemuda di jawa barat		150		150		150		150		150					
					Jumlah peserta Jambore pemuda Jawa Barat		350		350		350		350		350					
					Jumlah terpilihnya Pemuda Pelopor Tingkat Jawa Barat		80		80		80		80		80					
2. Meningkatkan prestasi olahraga dan pemasyarakatan olahraga	Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan.	Peningkatan Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional				Medali			28				30				58			
							1 Dokumen (hasil Peninjauan)				58	44,62%			72		130			

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
				Program Pembinaan. Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga	Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu	4 GOR Venue	4 57	42.900 73.040	5 43	86.900 115.500	5	175.000	5	175.000	4	175.000	23 66	654.800 188.540	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	
					Jumlah olahragawan berprestasi	360 Orang	585	2.860	1.095	44.000	1.305	6.000	1.415	8.000	1.915	11.000	1915	71.860		
					Jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga	9.860 Orang	6.900	677	8.650	1.650	10.400	3.000	10.998	4.000	13.900	6.000	50.848	15.327		
					Jumlah partisipasi organisasi dalam berolahraga	20 Organisasi	25	1.760	30	1.650	35	2.000	40	2.500	44	3.000	44	10.910		
				PENINGKATAN POTENSI ATLET MELALUI PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR (PPLP)															Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Provinsi Jawa Barat
					Jumlah pembinaan atlet pelajar melalui Program Pembinaan dan Latihan Atlet Potensial	43 cb	11 cb (85 Org)	5.000	22 cb (195 Org)	7.000	33 cb (305 Org)	9.000	43 cb (415 org)	11.000	43 cb (415 org)	13.000	43 cb (415 org)	45.000		
				Pemberiaan Penghargaan Bagi Insan Olahraga Tingkat Jawa Barat															Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan	Provinsi Jawa Barat
					Jumlah Insan Ollahraga yang diberi Penghargaan bagi Insan Olahraga Berprestasi Tingkat Jawa Barat Dalam Rangka HAORNAS	Orang	140 (2013/2014)	4.241	84	2.000	100	2.500	120	3.000	140	3.500	12.900	15.000		
					Jumlah atlet Jawa Barat yang diberi Penghargaan dalam pada Sea Games		100	5.000			120	9.000					220	14.000		
					Jumlah atlet Jawa Barat yang diberi Penghargaan pada Seagames dan Paragames				30	3.500			40	4.000			70	7.500		
					Jumlah atlet Jawa Barat yang diberi Penghargaan Penghargaan pada Pelaksanaan Peparpenas 2013		94	672	188	806			376	967			568	2.445		
					Jumlah atlet Pelajar yang diberi Penghargaann pada POPNAS 2013				500 org	1.000			520 org	1.500			1.020	2.500		
					Jumlah atlet Jawa Barat yang diberi Penghargaanpada PON 2016						2500 org	100.000					2500 org	100.000		
					Jumlah atlet Jawa Barat yang diberi Penghargaan pada PERPANAS						300 org	2.500					300 org	2.500		
				Penyelenggaraan POPDA, POPWILDA Jawa Barat dan Pengiriman Kontingen Ke POPWILNAS dan POPNAS															Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Provinsi Jawa Barat
					Jumlah peserta pada POPDA tingkat Jawa Barat		5000	2.500			5000	3.500			5000	4.500	15.000	10.500		
					Jumlah peserta pada POPWILDA tingkat Jawa Barat				4000	3.000			4000	4.000			8.000	7.000		
					Jumlah medali yang diraih pada pengiriman kontingen Jawa Barat ke POPNAS				28	4.500			30	5.000			58	9.500		
					Jumlah medali yang diraih pada pengiriman kontingen Jawa Barat ke POPWILNAS		1 Dokumen (hasil Peninjauan)	500			58	5.000			72	7.000	130	12.500		
				Monitoring Tenaga Keolahragaan Event Nasional dan Internasional															Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Provinsi Jawa Barat
					Jumlah peserta pada informasi SDM keolahragaa n event nasional dan internasional	Orang	135	1.800	150	2.160	165	2.600	180	3.111	200	3.733	830	13.404		
				Fasilitasi Pengembangan Tenaga Keolahragaan															Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Provinsi Jawa Barat
					Jumlah peserta pelatihan dalam pengembangan tenaga keolahragaan	Orang	501	1.300	550	1.560	605	1.872	665	2.245	731	2.696	3.052	93673		
				Jawa Barat sebagai Tuan Rumah POPNAS XIII 2015															Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Provinsi Jawa Barat
					Jumlah Cabang Olahraga pada POPNAS XIII 2015	19 cb	20 cb	25.000	20 cb	125.000							20	150.000		
				Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga															Bidang kemitraan, Sarpras	Provinsi Jawa Barat

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
					Jumlah bantuan sarana dan prasarana olahraga	Organisasi	27	1.500	27	1.500	27	1.500	27	1.500	27	1.500	135	7.500		
				Fasilitasi Peningkatan Kualitas Tenaga Keolahragaan															Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Provinsi Jawa Barat
					Jumlah peserta pada peningkatan mutu tenaga keolahragaan	Orang	891	1.800	980	2.160	1.078	2.600	1.185	3.111	1.303	3.733	5.437	13.404		
				Fasilitasi Pembinaan Olahraga Prestasi															Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Provinsi Jawa Barat
					Jumlah Cabang Olahraga penyelenggaraan Pembinaan Olahraga Prestasi	43 cb	8 cb	10.000	16 cb	13.000	24 cb	14.000	32 cb	15.000	43 cb	16.000	43	68.000		
				Pelaksanan PON XIX 2016, Peparnas XVII 2016 dan Pasca PON XIX 2016, Peparnas XVII 2016															Bidang kemitraan, Sarpras	Provinsi Jawa Barat
					Persentase penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX Tahun 2016 dan Peparnas XVII 2016	Persen	30,00 %	800	31,50 %	1.000	33,00 %	1.200	34,50 %	1.400	36,00 %	1.600	36 %	6.000		
				Sosialisasi dan Persiapan Jawa Barat sebagai Tuan Rumah PON XIX 2016															Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Provinsi Jawa Barat
					Persentase persiapan menuju PON XIX Tahun 2016	Persen	30,00 %	17.000	60 %	20.000	100%	25.000					100%	62.000		
					Persentasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga berkebutuhan khusus event regional nasional dan internasional.	Persen	-	-	2		3		4		5		6			
					Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga pendidikan dan ruang publik bermutu	4 GOR Venue	4 57		5 43		5		5		4		23 66			
					Persentasi pembangunan kawasan SPOrT Jabar Arcamanik	4 Paket	5		3		3		11		11		11			
	Meningkatnya minat masyarakat dalam berolahraga	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Tingkat Kebugaran Masyarakat				Organisasi	18		18		18		18		18		18			
				Fasilitasi Berbagai Kegiatan Olahraga di Masyarakat															Bidang Pembudayaan Olahraga	Provinsi Jawa Barat
					Jumlah peserta Peringatan HAORNAS	6.680 Orang	2.080	2500	2.330	2.750	2.580	3.000	2.830	3.250	3.080	3.500	12.900	15.000		
					Jumlah peserta Festival Olahraga Tradisional Tk. Jawa Barat	5000 Orang	1500		1750		2000		2250		2500					
					Jumlah peserta kontingen Jawa Barat pada festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional	1500 Orang	520		520		520		520		520					
					Jumlah peserta kontingen Jawa Barat pada festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional	90 Orang	30		30		30		30		30					
				Pelaksanaan POSPEDA (Pekan Olahraga dan Seni Pesantren Daerah) Tk. Jawa Barat															Bidang Pembudayaan Olahraga	Provinsi Jawa Barat
					Jumlah peserta POSPEDA Tingkat Jawa Barat	600 Orang	3900	2500	3900	2.750	3900	3.000	3900	3.250	3900	3.500	19.500	15.000		
				Pengerahan SP3OR															Bidang Pembudayaan Olahraga	Provinsi Jawa Barat
					Jumlah pengerahan dan penempatan SP3OR di kab/kota	78 orang	104	3500	104	3.500	104	3.500	131	4.000	131	4.000	235	18.500		
				Pemantapan 5 Program Kampanye Olahraga															Bidang Pembudayaan Olahraga	Provinsi Jawa Barat
					Jumlah peserta pada pekan kebugaran jasmani di 4 wilayah di Jawa Barat	29500 Orang	3000		4500		6000		7500		11700					
					Jumlah peserta pada pasnggiri pencak silat bagi pelajar tingkat Jawa Barat	832 Orang	540		540		540		540		9000					

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
					Jumlah peserta pada sepakbola saba desa di 4 wilayah di Jawa Barat	2560 Orang	1.280		1280		1280		1280		1280					
				Pengembangan Mitra Olahaga dengan berbagai Organisasi															Bidang kemitraan, Sarpras	Provinsi Jawa Barat
					Jumlah kemitraan dengan berbagai organisasi keolahragaan	21 Organisasi	25	500	30	800	35	900	40	1.000	44	1.080	44	4.280		
	Meningkatnya pembinaan olahraga berkebutuhan khusus	Persentasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga berkebutuhan khusus event regional nasional dan internasional.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga bagi yang Berkebutuhan Khusus		event	-	-	2		3		4		5		6			
					Persentasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga berkebutuhan khusus event regional nasional dan internasional	Persen	-	-	40%	2.300	55%	2500	75%	2700	90%	2900	100%	3100	Bidang Pembudayaan Olahraga	Provinsi Jawa Barat
	Meningkatnya sarana dan prasarana untuk olahraga masyarakat, pendidikan dan ruang publik bermutu	Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga pendidikan dan ruang publik bermutu				4 GOR Venue	4 57		5 43		5		5		4		23 66		Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan	Provinsi Jawa Barat
				Pengadaan Tanah, Perencanaan dan Pembangunan Relokasi Pacuan Kuda	Jumlah Pengadaan Tanah, Perencanaan dan Pembanguan Sarana dan Prasarana Area Pacuan Kuda, Tribun dan Equistrian di Jawa Barat	lokasi	1	15.000	1	85.000							1	100.000		
				Persiapan dan Pembangunan Infrastruktur Venue PON XIX Tahun 2016	Jumlah Venue pada Persiapan Infrastruktur PON XIX Tahun 2016 di Jawa Barat	Cabor	4	10.000	44	610.000							48	620.000	Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan	Provinsi Jawa Barat
	Meningkatnya sarana dan prasarana untuk sentra pembinaan olahraga pelajar	Persentasi pembangunan kawasan SPOrT Jabar Arcamanik				4 Paket	5		3		3		11		11		11			
				Pembangunan Lanjutan Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu (SPOrT) Jabar Arcamanik	Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan lanjutan SPOrT Jabar Arcamanik	4 Paket	5	90.000	3	230.000	3	200.000	11	5.500	11	5.500	11	531.000	Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan	Provinsi Jawa Barat
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM, daya dukung sarana prasarana operasional dan dana untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP				Nilai 50	Nilai 55		Nilai 60		Nilai 65		Nilai 70		Nilai 75		Nilai 80			
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1. Meningkatnya pelaporan pencapaian kinerja pembangunan. 2. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akurat, cepat, cermat dan berbasis IT**	80 Persen	100 %	200	100 %	200	100 %	200	100 %	200	100 %	200	100 %	1000	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	
				Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal	Persentase Jumlah dokumen Pelaporan Perencanaan dan Keuangan (Lakip, pergeseran dan perubahan anggaran, penyusunan pra RKA dan RKA 2014, penyusunan DPA 2014, penyusunan laporan kinerja, renstra, penyusunan LPPD)	80 Persen	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	500	Sekretariat	Provinsi Jawa Barat
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah	**Terwujudnya kesesuaian antara dokumen perencanaan provinsi dengan pusat dan kab/kota**	70 Persen	75 %	100	75 %	100	80 %	100	80 %	100	85 %	100	85 %	500	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
				Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Jumlah dokumen pada Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Pemuda dan Olahraga	70 Persen	75 %	100	75 %	100	80 %	100	80 %	100	85 %	100	85 %	500	Sekretariat	Provinsi Jawa Barat
		Prosentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti				80 Persen	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
				Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	Persentase Jumlah dokumen Pelaporan penatausahaan keuangan	80 Persen	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	500		
		Jumlah SDM aparatur yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya				50 Persen	50%		55 %		60%		65 %		70 %		70 %			
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Meningkatnya jaminan kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah**	50 Persen	50%	800	55 %	1.000	60%	1.200	65 %	1.400	70 %	1.600	70 %	6.000	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Disorda Prov. Jabar	Jumlah aparatur Disorda Provinsi Jawa Barat yang meningkat kapasitasnya melalui Olahraga, Kerohanian, Kesehatan Pegawai, Pelatihan	50 Persen	50%	800	55 %	1.000	60%	1.200	65 %	1.400	70 %	1.600	70 %	6.000	Sekretariat	Provinsi Jawa Barat
		Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik				100 Persen	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya**	100 Persen	100 %	1.252	100 %	1.500	100 %	1.750	100 %	2.000	100 %	2.250	100 %	8.752	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	
				Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Disorda Prov. Jabar	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran disorda Prov. Jabar melalui penyediaan dana surat menyurat, ATK, Jasa kantor, Cetak Pengadaan, Mamin, Perjalanan Dinas	100 Persen	100 %	1.252	100 %	1.500	100 %	1.750	100 %	2.000	100 %	2.250	100 %	8.752	Sekretariat	Provinsi Jawa Barat
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan standar daerah	100 Persen	100 %	750	100 %	1.000	100 %	1.250	100 %	1.500	100 %	1.750	100 %	6.250	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Disorda Prov. Jabar	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur Disorda Prov. Jabar melalui Pengadaan Saran dan Prasarana perkantoran	50 Persen	75 %	750	100 %	1.000	125 %	1.250	150 %	1.500	200 %	1.750	200 %	6.250	Sekretariat	Provinsi Jawa Barat
				Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Terpeliharanya sarana dan prasarana karena aparatur sesuai standar daerah**	100 Persen	150 %	850	200 %	1.500	250 %	1.750	300 %	1.300	350 %	1.450	350 %	5.750	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Disorda Prov. Jabar berupa kendaraan dinas, gedung dan bangunan, pelrengkapa n kantor, pemeliharaa n internet, Alat rumah tangga, halaman gedung dan bangunan PPLP/Gor Sasana	100 Persen	150 %	850	200 %	1.500	250 %	1.750	300 %	1.300	350 %	1.450	350 %	5.750	Sekretariat	Provinsi Jawa Barat
				Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	**Dukungan basis data yang akurat,terukur dan terintegrasi**	50 Persen	-	-	60 %	300	75%	300	80%	300	85 %	300	85 %	1.200	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	
				Penyusunan Data Statistik Bidang Pemuda dan Olahraga serta Pengembangan Website	Jumlah Dokumen Data statistik Bidang Pemuda dan Olahraga	50 Persen	-	-	60 %	300	75%	300	80%	300	85 %	300	85 %	1.200	Sekretariat	Provinsi Jawa Barat

Bandung, 2017
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI JAWA BARAT

Prof. Dr. H. YUDHA M. SAPUTRA, M.Ed.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630312 198901 1 002

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 adalah :

1. Metetapkan Visi, Misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja OPD dan perencanaan penganggaran
3. Menetapkan pedoman untuk penyusunan RPJMD dan RKPD serta perencanaan penganggaran kabupaten dan kota se Jawa Barat
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang terkait dengan misi 5 (Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olahraga, serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal) adalah :

1. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta penanganan komunitas tertentu
3. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, seni, budaya, dan pariwisata
4. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang menetapkan indikator kinerja :

1. Ketersediaan pembinaan lembaga dan organisasi kepemudaan
2. Meningkatnya kematangan karakter dan mental pemuda menuju Jawa Barat Juara
3. Jumlah sarana olahraga masyarakat dan olahraga pendidikan dan ruang publik bermutu
4. Jumlah olahragawan berprestasi
5. Jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga
6. Jumlah partisipasi organisasi dalam berolahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat menetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Ketersediaan pembinaan lembaga organisasi kepemudaan
2. Meningkatnya kematangan karakter dan mental pemuda menuju Jawa Barat Juara
3. Jumlah sarana olahraga masyarakat dan olahraga pendidikan dan ruang publik bermutu
4. Jumlah olahragawan berprestasi
5. Jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga
6. Jumlah partisipasi organisasi dalam berolahraga
7. Jumlah SDM aparatur yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya baik Teknis Subtantif maupun Manajemennya.
8. Prosentase aparatur yang lulus uji kompetensi
9. Prosentase aparatur yang mendapat tindakan disiplin
10. Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik
11. Index kepuasan masyarakat
12. Prosentase pendapatan operasional
13. ISO 9001 : 2008
14. Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun berupa :
    - Renstra Tahun 2013 -2018
    - RKA
    - Perubahan DPA

- Rencana Kerja Tahunan
- Penetapan kinerja
- LKPJ
- LPPD
- Evaluasi kerja
- Laporan fisik dan keuangan bulanan

15. Jumlah Dokumen Perencanaan
16. Jumlah Dokeuman Data Statistik dan Website

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat YangMengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	a. Meningkatnya peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan		80	90	100	110	110	110 organisasi
	b. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan menuju Jawa Barat juara		746 orang	769 orang	796 orang	916 orang	916 orang	1832 orang
	c. Mendukung pembangunan gelanggan olahraga di Kab/Kota		57 venue 4 GOR	43 venue 5 GOR	5 GOR	5 GOR	4 GOR	100 Venue 23 kab/kota
	d. Meningkatnya dukungan terhadap olahraga prestasi secara berkelanjutan dan olahraga masyarakat		585 orang	1095 orang	1305 orang	1415 orang	1915 orang	1915 orang
	e. Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dan organisasi dalam berolahraga		6900 orang 25 Organisasi	8650 orang 30 Organisasi	10400 orang 35 Organisasi	10998 orang 40 Organisasi	13900 orang 44 Organisasi	50848 orang 44 Organisasi

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun
		Tahun 0	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	a. Jumlah SDM aparatur yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya							
	• Teknis Subtantif		5	5	5	5	5	25
	• Manajemen		5	5	5	5	5	25
	b. Prosentase aparatur yang lulus uji		60	70	80	90	100	100
	c. Prosentase Aparatur yang mendapat tindakan disiplin		2	2	2	2	2	2
	d. Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik		80	80	90	90	100	100
	e. Index Kepuasan Masyarakat		80	80	80	80	80	80
	f. Prosentase pendanaan operasional		100	100	100	100	100	100
	g. ISO 9001 : 2008		1	-	-	-	-	1

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun
		Tahun 0	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	h. Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun							
	• Renstra Tahun 2013/2018		1	-	-	-	-	1
	• RKA		1	1	1	1	1	5
	• Perubahan DPA		1	1	1	1	1	5
	• Rencana Kerja Tahunan		1	1	1	1	1	5
	• Rencana Kinerja Tahunan		1	1	1	1	1	5
	• Penetapan kinerja LKPJ		1	1	1	1	1	5
	• LPPD							
	• Evaluasi Kinerja		1	1	1	1	1	5
	• Fisik dan Keuangan		1	1	1	1	1	5
	Bulanan		12	12	12	12	12	60

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 telah disusun secara substansi mengacu pada Rencana Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Dengan demikian komponen yang ada didalamnya telah memuat apa yang menjadi harapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tercermin dalam visi dan misi RPJMD Tahun 2013-2018 yang dijabarkan kedalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator saran, kebijakan Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tentunya akan sukses mengimplementasikan Rencana Strategisnya apabila didukung sepenuhnya oleh segenap Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga, serta kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholder*).

Bandung, 2017
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Jawa Barat

Prof. DR. H. YUDHA M. SAPUTRA, M.Ed
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630312 198901 1002

INFORMASI :

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT
Komplek SPOrT Jabar Arcamanik
Jalan. Pacuan Kuda Nomor 140 Arcamanik Kota Bandung - 40293
Telp. (022) 87884268 Fax. (022) 87881419
http://dispora.jabarprov.go.id
email : dispora@jabarprov.go.id

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA BARAT